



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019

Linawati¹, Marini²,

¹elin.linawati79@gmail.com, ²marini5305@gmail.com,

^{1,2}Universitas Pamulang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba, serta menguji good corporate governance memoderasi hubungan antara perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan manajemen laba. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 - 2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, manajemen laba diukur dengan menggunakan rumus stubben. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Implikasi dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi semua pihak. Sebagai bahan pertimbangan bagi regulator dalam mengeluarkan kebijakan publik yang lebih memahami adanya fenomena praktik manajemen laba sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat melindungi kepentingan pembaca laporan keuangan. Bagi investor/calon investor dan kreditor disarankan untuk lebih cermat dalam menilai kinerja manajemen, kondisi perusahaan, dan memahami laba yang dilaporkan mengingat belum tentu laba tersebut merupakan laba yang sebenarnya. Pengguna laporan keuangan harus lebih berhati-hati dalam penggunaan laporan keuangan, tidak menilai perusahaan hanya dari kemampuan menghasilkan keuntungan tanpa menilai aspek lain. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan bagi perusahaan dalam mencermati perilaku manajemen dalam aktivitas manajemen laba yang berkaitan dengan kepentingan pihak manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba serta corporate governance dapat memoderasi hubungan antara perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan manajemen laba.

Kata kunci : Corporate Governance, Pajak Tangguhan, , Laba

Abstract

This study aims to examine the effect of tax planning and deferred tax expense on earnings management, as well as testing good corporate governance moderating the relationship between tax planning, deferred tax expense and earnings management. The data used in this study is the annual report of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2015 - 2019. This study uses a quantitative method, earnings management is measured using the stubben formula. This study uses multiple linear regression analysis tools. The implications of the research are expected to make a positive contribution to all parties. As a consideration for regulators in issuing public policies that better understand the phenomenon of earnings management practices so that the policies issued can protect the interests of financial statement readers. Investors/potential investors and creditors are advised to be more careful in assessing the performance of management, the condition of the company, and understanding the reported profits, considering that these profits are not necessarily actual profits. Users of financial statements should be more careful in the use of financial statements, not judging the company only from the ability to generate profits without judging other aspects. With this research, it is hoped that it can provide input for companies in observing management behavior in earnings management activities related to the interests of management. The results show that tax planning and deferred tax expense affect earnings management and corporate governance can moderate the relationship between tax planning, deferred tax expense and earnings management.

Keywords : Corporate Governance, Deferred Tax, , earnings



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi secara periodik yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara agen dan principal, serta digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi berkaitan dengan ukuran kinerja perusahaan yaitu laporan laba rugi. Laba merupakan ukuran kinerja perusahaan yang menjadi pusat perhatian para pemegang saham terkait perolehan dividen di akhir periode. Sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemegang saham, manajemen berusaha untuk membuat laba dalam laporan keuangannya menguntungkan bagi pemegang saham dan perusahaan, yang cenderung melakukan praktik manajemen laba.

Manajemen laba dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara agent dan principal dan sering dipraktikkan oleh beberapa perusahaan dengan sengaja memanipulasi laba yang motivasinya untuk memperoleh keuntungan bagi pihak perusahaan. Dalam aktivitas manajemen laba, manajemen sebagai penanggung jawab kegiatan operasional perusahaan dapat menaikkan dan menurunkan laba perusahaan sesuai dengan motivasinya, yaitu perusahaan berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya. Menurut Subramayam dan John (2010:130) manajemen laba merupakan hasil akuntansi akrual yang paling bermasalah, karena dapat merusak kredibilitas informasi akuntansi, sehingga mengurangi keandalan laporan keuangan yang berdampak pada pemakai laporan keuangan tersebut.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi praktik manajemen laba salah satunya adalah perencanaan pajak yang merupakan usaha wajib pajak atau perusahaan untuk memperkecil pajak terutang, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak menurut Pohan (2013:18) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan

yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Dalam praktik manajemen laba, perencanaan pajak memiliki peranan karena perusahaan berasumsi bahwa dengan menekan beban pajak akan mengurangi pengeluaran perusahaan dan meningkatkan laba. Aktivitas perencanaan pajak memicu konflik antara perusahaan dan pemerintah, satu sisi menguntungkan perusahaan karena pajak dibayar dalam jumlah yang kecil dan laba perusahaan bertambah sedangkan disisi pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya dapat dilakukan dengan cara memilih penetapan tarif pajak badan, memilih metode penghitungan PPh pasal 21 dan dengan cara lainnya yang lebih menguntungkan perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan.

Faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba adalah beban pajak tanggungan, dengan adanya motivasi penghematan beban pajak atau menunda pajak yaitu dilakukan dengan cara menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. Laba perusahaan yang tinggi akan memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba guna meminimalkan beban pajak. Penyajian laporan laba rugi berdasarkan PSAK akan berbeda dengan peraturan perpajakan, yaitu akan membedakan antara laba sebelum pajak (perhitungan laba akuntansi menurut PSAK) dan penghasilan kena pajak (perhitungan laba fiskal menurut aturan fiskal). Perbedaan ini merupakan hasil rekonsiliasi fiskal antara laporan laba komersial dengan peraturan perpajakan, perbedaan ini menjadi salah satu alat bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laba menjadi lebih tinggi. Salah satu hal yang dilakukan manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba atas beban pajak tanggungan yaitu dengan cara mengecilkan beda waktu dalam penghitungan beban pajak.

Praktik manajemen laba bukan hal yang diharapkan oleh para investor dan pemegang



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2021

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

saham, karena hal ini memungkinkan manajemen menentukan beberapa tingkatan dalam menentukan jumlah dan waktu akrual akhir periode. Pemegang saham mengharapkan laba yang sebenarnya, oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dapat menekan tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya tata kelola yang baik terhadap perusahaan diharapkan mampu mengatasi masalah dan mendeteksi manajemen laba dengan sistem pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam sebagian besar perusahaan berskala besar sangat kecil peluang kemungkinan praktik terjadi, karena pada perusahaan tersebut akan sangat hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dilakukan untuk dipertanggungjawabkan kepada investor. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan akan diawasi oleh komite tersendiri dalam perusahaan guna memastikan sistem dan prosedur perusahaan telah dijalankan dengan baik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulansari (2019) yang menyimpulkan bahwa manajemen laba hipotetis dapat dipengaruhi oleh variabel perencanaan pajak, biaya pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan dan sisanya 74,9% dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

Dalam praktiknya tidak sedikit perusahaan besar melakukan skandal keuangan pada tahun 2000-an yang melibatkan beberapa perusahaan besar didunia seperti Enron, WorldCom, Parmalat, Xerox serta Toshiba, yang menghadapi kasus earnings manajemen, hal ini mendorong diterbitkan regulasi untuk mengantisipasi agar kasus serupa tidak terulang di masa yang akan datang, contohnya diterbitkannya Sarbanes-Oxley Act di Amerika yang mewajibkan agar perusahaan mempunyai perangkat dewan yang dapat memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan untuk mencegah praktik earnings management oleh para manajer. Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menekan tindakan manajemen laba, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawardi (2013) membuktikan bahwa komite audit yang ada di perusahaan sebagai salah satu

mekanisme corporate governance tidak mampu mengurangi tindak manipulasi laba oleh manajemen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba, untuk mengetahui apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba, untuk mengetahui apakah *good corporate governance* memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba, dan untuk mengetahui apakah *good corporate governance* memoderasi hubungan antara beban pajak tangguhan dan manajemen laba

LANDASAN TEORITIS

Teori Agensi

Teori agensi memiliki asumsi bahwa masing-masing pihak baik pemilik perusahaan maupun pihak manajemen memiliki kepentingan dan keinginan sendiri-sendiri sehingga mereka berusaha untuk memenuhi kepentingan sendiri tersebut. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara principal dan agent. Pihak pemilik (principal) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat karena pihak pemilik (principal) tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-hari. Untuk memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham (pemilik) (Scott, 2015:445).

Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2017:23) laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi saat ini. Kondisi perusahaan terkini maksudnya adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu. Sedangkan Menurut Prihadi (2014:44) mengemukakan bahwa



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

laporan keuangan adalah hasil (output), sedangkan masukannya (input) berupa transaksi bisnis. Supaya masuk kedalam sistem pencatatan, seluruh input harus disertai dengan bukti-bukti transaksi.

Manajemen Laba

Menurut Fahmi (2013:279) “*earnings management* adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan. Tindakan *earnings management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya”.

Menurut Fahmi (2013:279) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management* (manajemen laba) yaitu :

1. Standar akuntansi keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi.
3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan”.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak bukan merupakan *tax avoidance* melainkan usaha untuk meminimalkan beban pajak untuk menambah laba serta tujuan lain dari perencanaan pajak untuk meminimalkan temuan atau kejutan dari pemeriksaan pajak Menurut Suandy (2011:16), pengertian perencanaan pajak adalah “Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak”.

Pohan (2013:21) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, antara lain meliputi, mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana.

Beban Pajak Tangguhan

Pajak Tangguhan terjadi akibat adanya perbedaan temporer antara PPh terutang yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak dengan beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba komersial. Menurut Harnanto (2013:115), beban pajak tangguhan dapat diartikan “Beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”.

Good Corporate Governance

Menurut Sutedi (2012) *Corporate Governance* merupakan sebuah metode dan sistem yang dipergunakan oleh pemegang saham, komisaris/ dewan pengawas, dan direksi) dalam rangka meningkatkan kesuksesan bisnis dan akuntabilitas perusahaan agar tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, sesuai peraturan undang-undang dan nilai-nilai etika.

Menurut Tunggal (2013), *good corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar.



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKKG) tahun 2006, terdapat lima asas *Corporate Governance* antara lain:

1. **Transparansi (*Transparency*)**
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung-jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. **Independensi (*Independency*)**
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pengujian Hipotesis

Perencanaan pajak merupakan proses menentukan bagaimana, kapan dan dengan siapa dalam melakukan transaksi dagang, sehingga timbul faktor-faktor pajak dan bukan pajak yang material yang dapat diambil untuk mencapai beban pajak serendah mungkin sejalan dengan tujuan perusahaan yaitu mencapai laba. Perencanaan pajak berpengaruh positif artinya semakin tinggi perencanaan untuk menghemat pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Tujuan perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang disetor dan dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya manajemen laba. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis pertama, H1: Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba

Pajak tangguhan timbul karena adanya perbedaan beban antara peraturan perpajakan (fiskal) dengan standar akuntansi keuangan (komersial) pajak tangguhan merupakan beban pajak atau *deferred tax expense* yang dapat memberikan pengaruh seperti menambah atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang. Hal ini menyebabkan perbedaan yang sifatnya tidak mutlak selamanya, melainkan hanya sementara saja karena adanya perbedaan waktu dan angka tahun pembagi, serta pada titik tertentu beban pajak yang ditimbulkan akan pada besaran nominal yang sama. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa beban pajak tangguhan akan mengurangi laba ditahun mendatang sehingga tidak akan berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua, H2: Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penerapan *corporate governance* dalam perusahaan diyakini mampu menciptakan kondisi perusahaan yang baik, menyajikan informasi yang berkualitas dan transparan terutama dalam perencanaan perpajakan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat diandalkan oleh para stakeholders dalam pengambilan keputusan ekonomi.



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Perencanaan pajak bukan merupakan *tax avoidance* ataupun *tax evasion*, tetapi merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang menghasilkan sebuah keputusan dan harus dikendalikan dengan baik dan didukung oleh peranan corporate governance, maka hipotesis yang ketiga, H3: Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan dimoderasi oleh praktik corporate governance.

Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan). Besarnya pajak tangguhan ditentukan oleh perbedaan temporer, dan pembebanannya akan ditangguhkan mengurangi laba masa mendatang. Penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang salah satunya adalah transparansi laporan keuangan serta dilakukan audit oleh auditor eksternal dapat membuktikan bahwa tidak ada hubungannya beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba, karena hal ini ditentukan oleh perbedaan temporer akibat perbedaan pengakuan laba menurut komersial dan fiskal. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan hipotesis yang keempat, H4: Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba dimoderasi oleh praktik *Corporate Governance*

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh Febrian (2018), menyimpulkan bahwa Perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba dan Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian Febrian (2018) mendukung penelitian yang dilakukan oleh Baradja (2017) yang menyimpulkan bahwa Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Manajemen Laba, Perencanaan Pajak memiliki nilai positif signifikan yang berarti variabel Perencanaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam

pengungkapan Manajemen Laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrat (2014) yang menyimpulkan bahwa Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Data diperoleh dengan cara mengakses website www.idx.co.id.

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu.

Instrumen pengukuran variable manajemen laba dan satu model pengukuran yang digunakan yaitu *revenue model* stubben (2010) dengan formula sebagai berikut :

$$\Delta AR_{it} = \alpha + \beta_1 \Delta R1_3it + \beta_2 \Delta R4it + \epsilon_{it}$$

di mana:

AR : Perubahan Piutang pada kuartal ke empat

R1_3 : Perubahan Pendapatan dalam tiga kuartal pertama

R4 : Perubahan Pendapatan dikuartal keempat.

ϵ : error

Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) dengan rumus sebagai berikut :

$$TRR_{it} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Pretax Income (EBIT)}_{it}}$$

Keterangan:

TRR_{it} = *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak perusahaan i pada tahun t.

Net Income_{it} = Laba bersih i pada tahun t.

Pretax Income (EBIT)_{it} = Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t.

Beban pajak tangguhan dengan total asset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

yang dihitung dengan proporsional.

$$DTEit = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Total asset t-1}}$$

Keterangan ;

DTEit = Defferent Tax Expense (beban pajak tangguhan) perusahaan i pada tahun t.

Menunjuk pada penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2017) Proses dari analisis menggunakan ASEAN CG scorecard yaitu dengan membaca laporan tahunan perusahaan dan informasi pada website perusahaan untuk menjawab 184 pertanyaan yang diajukan dalam scorecard tersebut. Skor 1 diberikan jika jawabannya YA dan skor 0 jika jawabannya TIDAK. Selanjutnya skor yang diperoleh pada tiap bagian dihitung sesuai ketentuan dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard : Country reports and assessments 2013–2014 (Asian Development Bank, 2014). bobot masing-masing tema sebagai berikut :

1. Hak Pemegang Saham, 10%
2. Pendekatan Perataan Pemegang Saham, 15%
3. Peran Stockholders , 10%
4. Pengungkapan dan transparansi, 25%
5. Tanggungjawab Dewan, 40%

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier berganda yang digunakan tiap hipotesis. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS Versi. 25. Analisis regresi linier berganda dapat digunakan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + e$$

Keterangan:

Y = Manajemen Laba;

β_0 = Konstanta;

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_8$ = Koefisien Regresi dari masing-masing variabel bebas;

X1 = Perencanaan Pajak (Tax Planning)

X2 = Beban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Expense)

Z = Corporate Governance

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian

Periode pengamatan dilakukan selama 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2015-2019, namun rentang waktu yang digunakan mulai dari tahun 2014. Penggunaan data keuangan tahun 2014 hanya digunakan sebagai data untuk pengukuran variabel manajemen laba yang diproksikan dengan perubahan piutang dan pendapatan.

Statistik Deskriptif

Berikut ini statistik deskriptif dari 270 data penelitian yang terdiri dari variabel perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, corporate governance dan manajemen laba adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Y	270	,000	,978	,36529	,303620
X1	270	,436	,890	,74034	,043897
X2	270	,000	,010	,00183	,002005
X1Z	270	16,582	28,171	21,19	1,908760
X2Z	270	,000	,286	,05171	,056612

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk memenuhi persyaratan dan memperoleh penaksiran yang terbaik. Adapun uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas

Uji Normalitas

penelitian ini sebanyak 270 data. Pengujian menunjukkan bahwa variabel memiliki nilai distribusi sebesar 0,000 yang berarti nilainya tidak normal, karena nilai signifikan kurang dari 0,05. Pada penelitian ini telah diupayakan tindakan untuk menormalkan data, yaitu dengan cara menghilangkan data outlier dan untuk melihat data yang outlier dilakukan uji analisis deskriptif



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

statistik explore serta casewise diagnostics dengan deviasi standar 3. Dari tabel diatas, hasil pengujian menunjukkan hasil tidak terdistribusi normal kemungkinan dikarenakan beberapa data menunjukkan angka mendekati nol bahkan nilainya nol. Seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2. Uji Normalitas

		Y	X1	X2	X1Z
N		270	270	270	270
Normal Parameters	Mean	0,36	0,74	,052	21,18
	Std. Deviation	0,30	0,04	,057	1,91
Most Extreme Differences	Absolute	0,28	0,10	0,18	0,05
	Positive	0,28	0,06	0,12	0,05
	Negative	-0,13	-0,10	-0,18	-0,03
Test Statistic		0,28	0,10	0,18	0,05
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,00 ^c	0,00 ^c	0,00 ^c	0,00 ^c

Uji Multikolinieritas

variable yang datanya terjadi multikolinieritas, hal ini kemungkinan dikarenakan variabel X2 yaitu beban pajak tanggungan nilainya hampir mendekati nol serta adanya penggabungan dengan variabel moderating. Hal ini didukung oleh teori Disatnik dan Sivan (2016) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa moderated multiple regression terjadi masalah multikolinieritas ketika variabel-variabel sangat berkorelasi karena multikolinieritas ini hanya masalah skala interval, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Var	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,780	1,282	Tidak terjadi Multikolinieritas
X2	0,008	129,074	Terjadi Multikolinieritas
X1Z	0,654	1,530	Tidak terjadi Multikolinieritas
X2Z	0,008	127,566	Terjadi Multikolinieritas

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian yang terlihat pada table 4, menunjukkan semua variabel bebas menunjukkan hasil pengujian yang memiliki tingkat signifikan diatas atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variable

bebas tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas dalam varian kesalahan

Tabel 4. Uji heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,424	0,177		2,391	0,017
X1	-0,003	0,258	-0,001	-0,011	0,991
X2	-5,316	56,600	-0,065	-0,094	0,925
X1Z	-0,008	0,006	-0,098	-1,295	0,196
X2Z	0,152	1,993	0,053	0,076	0,939

**Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Statistik F**

Dari hasil uji ANOVA atau F test pada tabel 5 dibawah ini, F hitung untuk ketika model tersebut menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,001 jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, hal ini berarti Perencanaan Pajak (X1), beban pajak tanggungan (X2), secara bersama-sama(simultan) terhadap variabel manajemen laba(Y) yang dimoderasi oleh variabel moderating dan *corporate governance* (Z).

Tabel 5. Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,759	4	0,440	5,057	0,001 ^b
Residual	23,039	265	0,087		
Total	24,798	269			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X1.X2,X1Z,X2Z

Hasil Uji Statistik t

Hasil uji statistik t pada penelitian ini memiliki hasil signifikan pada variabel perencanaan pajak, beban pajak tanggungan sedangkan yang lainnya tidak signifikan terhadap variabel dependen. Penjelasan dan nilai beta yang dihasilkan terlihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Uji t

Model	Beta	Sig	t	Keterangan
(Constant)	0,438	1,373	0,171	



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

X1	0,932	2,009	0,046	Diterima
X2	144,810	1,421	0,156	Ditolak
X1Z	-0,036	-3,059	0,002	Ditolak
X2Z	-5,274	-1,471	0,143	Ditolak

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,438 + 0,932X_1 + 144,810X_2 - 0,036X_{1Z} - 5,274X_{2Z} + e$$

Pembahasan

1. Konstanta

Berdasarkan tabel 4.6 konstanta sebesar 0,438, ini dapat diartikan jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat sebesar 0,438 dan tingkat signifikansi konstanta sebesar 1,373 lebih besar dari alpha 0,05.

2. Perencanaan Pajak (X1)

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda secara parsial yang ditunjukkan pada tabel 4.6 diatas, Nilai koefisien untuk variabel independen Perencanaan Pajak (X1) sebesar 0,932, memiliki arti apabila variabel independen Perencanaan Pajak (X1) mengalami peningkatan dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap, maka variabel dependen yaitu manajemen laba akan turun naik sebesar 0,932 dan nilai signifikansi t Perencanaan Pajak (X1) 0,046 lebih kecil dari alpha 0,05 maka hipotesis pertama yaitu perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba diterima dan hasil tersebut mendukung penelitian Febrian (2018) dan Baradja (2017) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba

3. Beban Pajak Tangguhan

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda secara parsial yang ditunjukkan pada tabel 4.6 diatas, Nilai koefisien untuk variabel independen Beban Pajak Tangguhan (X2) sebesar 144,810 memiliki arti apabila variabel independen Beban Pajak Tangguhan (X2) mengalami peningkatan dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap, maka

variabel dependen yaitu manajemen laba akan turun naik sebesar 144,810 dan nilai signifikansi t Beban Pajak Tangguhan (X2) Beban Pajak Tangguhan (X2) lebih besar dari alpha 0,05, maka hipotesis kedua beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba ditolak, karena hasilnya membuktikan beban pajak tangguhan (X2) berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak dapat mendukung hasil penelitian Febrian (2018) dan Baradja (2017) yang menyimpulkan bahwa Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Manajemen Laba, tetapi mendukung pendapat Ningrat (2014) yang menyimpulkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba

4. Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.dengan dimoderasi oleh Corporate governance

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda secara parsial yang ditunjukkan pada tabel 4.6 diatas, dijelaskan bahwa Perencanaan Pajak (X1) setelah dimoderasi terhadap *Corporate governance* (Z) adalah memiliki koefisien moderasi negatif sebesar -0,036 dan nilai signifikansinya sebesar 0,002 lebih besar dari 0,05, karena hasil uji pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba berpengaruh positif maka pengujian hipotesis *corporate governance* memperkuat hubungan terhadap hubungan perencanaan pajak (X1*Z) terhadap manajemen laba tidak dapat membuktikan bahwa *corporate governance* memperkuat hubungan positif perencanaan pajak terhadap manajemen laba dan hipotesis ditolak.

5. Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.dengan dimoderasi oleh Corporate governance

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda secara parsial yang ditunjukkan pada tabel 4.6 diatas, dijelaskan bahwa Beban Pajak Tangguhan (X2) setelah dimoderasi terhadap



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Corporate governance (Z) adalah memiliki koefisien moderasi negatif sebesar -5,274 dan nilai signifikansinya sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, sehingga beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba tidak dapat dimoderasi oleh *corporate governance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba dan *corporate governance* sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan hipotesis diterima. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian Febrian (2018 dan Baradja (2017) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.
2. Hipotesis kedua beban pajak tangguhan tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba ditolak, karena hasilnya membuktikan beban pajak tangguhan (X2) berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak dapat mendukung hasil penelitian Febrian (2018) dan Baradja (2017), tetapi mendukung pendapat Ningrat (2014) yang menyimpulkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba. *Corporate governance* tidak terbukti memperkuat hubungan positif antara arus kas dan persistensi laba.
3. Hipotesis ketiga ditolak, karena hasil penelitian tidak dapat membuktikan bahwa *corporate governance* mampu memoderasi hubungan positif antara perencanaan pajak

dengan manajemen laba, sehingga penelitian ini tidak berhasil dibuktikan, karena memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan.

4. Hipotesis ketiga ditolak karena hasil penelitian menunjukkan nilai yang tidak signifikan dan negatif yang artinya bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan tidak dapat dimoderasi oleh *corporate governance*

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya:

1. Pengujian dilakukan dengan tanpa variabel moderating tidak terjadi multikolinearitas, namun setelah dilakukan analisis dengan menggunakan variabel moderating, beberapa variabel mengalami multikorelasi.
2. Terjadinya multikorelasi dimungkinkan dikarenakan pada variabel beban pajak tangguhan diperoleh hasil perhitungan sebesar mendekati nol atau sama sekali nilainya nol,
3. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, dan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi manajemen laba.

Saran

Saran untuk Penelitian Selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk meneliti *corporate governance* selain ACGS seperti diukur dengan indeks persepsi CG yang dikeluarkan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).
2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan mengganti variabel beban pajak tangguhan karena tidak semua perusahaan publish menyajikan beban pajak tangguhan. tetapi beberapa perusahaan menyajikan manfaat pajak tangguhan .
3. Untuk penelitian selanjutnya agar diganti pengukuran manajemen laba selain rumus Stubben.



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

DAFTAR

- Baradja. (2017). *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba*. Jurnal Akuntansi Trisakti ISSN: 2339-0832. Volume. 4 Nomor. 2
- Disatnik.D, dan L. Sivan. 2016., The multicollinearity illusion in moderated regression analysis. *Springer Science+Business Media New York*. 27:403–408.
- Fahmi, Irham. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Febrian. (2018). *Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba*. Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi Vol. 12 No. 2
- Harnanto. (2013). *Perencanaan Pajak. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawaliipers.
- Ningrat, Hadi Kusuma. (2014). Analisis Beban Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Profitabilitas Manajemen Laba. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prihadi, Toto. (2014). *Memahami Laporan Keuangan sesuai IFRS dan PSAK*. Jakarta : Ppm

PUSTAKA

- Scott, R. William. (2015). *Financial Accounting Theory. Seventh Edition*. Pearson Prentice Hall: Toronto.
- Stubben, Sthepen R. (2010). *Discretionary Revenues as a Measure of Earnings Management*. The Accounting Review, Vol. 85, No. 2, Hal 695-717.
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. Edisi 6. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam, KR dan John, J. Wild. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Buku Satu. Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi.Adrian. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tunggal.A.W. (2013). *The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Audit*. Jakarta: Harvarindo.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wulansari.T.A (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*. Vol 2 No 2